

Pembangunan Desa Pedalaman Di Desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur

Antonius Mering¹, Achmad Djumlani², Syahrani³

Abstract

The issues raised in this research are how is the implementation of hinterland rural development that conducted in Long Nyelong Village Subdistrict Busang in East Kutai and what are the potentials of natural resource and human resource to support the development in Long Nyelong Village Subdistrict Busang in East Kutai Regency and also what are the barriers to implement the development of hinterland rural in Long Nyelong Village Subdistrict Busang in East Kutai Regency. In this study the writer uses descriptive research with qualitative approach and the data analysis that is used in this study will be used with qualitative method, the research will describe and analyze the data that have been obtained, and furthermore they will be elaborated in an actual explanation.

Keywords: Development, Rural, Hinterland

Abstrak

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembangunan desa pedalaman yang dilakukan di Desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur dan apa potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pedalaman di Desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur serta apa saja hambatan pelaksanaan pembangunan desa pedalaman di Desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan dengan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya.

Kata Kunci : Pembangunan, Desa, Pedalaman

Pembangunan desa dilaksanakan melalui peningkatkan prakarsa dan peranan swadaya masyarakat desa untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan melalui Lembaga Sosial Desa yang kemudian disempurnakan menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) serta melaksanakan penataan desa, pemukiman kembali serta pembinaan kelompok-kelompok penduduk yang masih hidup terpencil dan terpecah dengan mata pencaharian bercocok tanam secara berpindah-pindah.

Keberhasilan pembangunan desa akan lebih dapat dirasakan, apabila proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

kebutuhan masyarakat desa/kelurahan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka proyek-proyek Bantuan Pembangunan Desa ini direncanakan, dilaksanakan, diawasi serta dipelihara oleh masyarakat secara bergotong-royong.

Telah banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui berbagai penyediaan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan), peningkatan keterampilan dan sebagainya. Namun karena kondisi alam yang berbeda, masih banyaknya desa yang terpencil, kepadatan penduduk yang tidak seimbang, belum berfungsinya semua lembaga desa yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1979, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang belum memadai, maka tingkat produktivitas masyarakat desa masih rendah.

Sehubungan dengan itu maka untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan desa, disamping pemberian dana bantuan pembangunan, diperlukan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu. Dengan demikian diharapkan desa sebagai satuan terkecil dalam susunan administrasi pemerintahan, ikatan masyarakat dan kegiatan ekonomi, dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat menjadi desa yang maju (swasembada), sehingga kedudukan desa dapat berubah dari obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan yang mampu memantapkan ketahanan nasional.

Kemajuan dan kemakmuran desa ditentukan oleh usaha penduduk desa selain tata geografinya. Desa yang memiliki banyak sumber daya alam tetapi penduduknya tidak cukup mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan semangat membangun mengakibatkan desa kurang maju. Sebaliknya, meskipun desa memiliki sumber daya alam terbatas tetapi penduduknya terampil, berpengetahuan, dan bersemangat dalam membangun desa sehingga mampu mengatasi hambatan alam dan geografis wilayah maka desa akan cepat maju.

Pengertian Pembangunan Desa

Dalam teori pembangunan desa dari Rondinelli yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain. Pembangunan desa, bukan yang hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari PNPM Mandiri Perdesaan dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil

dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut.

Melihat konsep pembangunan Desa Terpadu yang merupakan suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa (Poostchi,1986). Dengan demikian, strategi ini lebih banyak menaruh perhatian pada proses penyampaian dari pada mengembangkan kapasitas dan respon masyarakat. Karena masyarakat desa mempunyai banyak aspek, usaha pembangunan desa bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. Apabila usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda, akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan aktivitas desa dalam rangka melaksanakan programnya masing-masing. Untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta untuk mewujudkan proses yang saling mendukung, maka perlu dilakukan suatu pendekatan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut, untuk maksud tersebut kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal sebagai pembangunan desa terpadu. Konsep pembangunan desa terpadu juga dapat memberikan penampakan dilihat dari berbagai dimensi.

Pembangunan Masyarakat Desa

Esensi dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari dan untuk rakyat. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa esensi utama dari pemerintahan yang demokratis akan berubah dalam beberapa waktu mendatang. Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

Pembangunan adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah paling rendah yang dilaksanakan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, hal ini dilakukan agar tidak timbul ketimpangan serta ketidakselarasan dengan tujuan pembangunan. Adapun menurut Siagian

(2002) : *"Pembangunan adalah suatu pertumbuhan dan perubahan yang berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa."*

Pembangunan Desa yang Berkelanjutan

Tentang definisi pembangunan desa/kelurahan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa mendefinisikan : *"Pembangunan desa/kelurahan dilaksanakan dalam rangka perimbangan kegiatan yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat desa/ kelurahan. Pemerintah memberi bimbingan, pembinaan, pengarahan, dan bantuan lainnya untuk meningkatkan swadaya untuk selanjutnya dapat mengembangkan potensi desa/ kelurahan."* Pembangunan desa/ kelurahan merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakatnya, karena dengan cara tersebut segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat akan tergali lebih banyak lagi.

Selanjutnya dikatakan oleh Muhammad Siswosoedharmo (2002) bahwa ; *"Pembangunan desa/ kelurahan dapat diarahkan untuk mencukupi kebutuhan pokok dari warga desa seperti sandang, pangan, dan papan serta peningkatan mutu pelayanan."*

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sebagai salah satu model pendekatan pembangunan (*bottoming up approach*) merupakan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Dan dalam pemberdayaan masyarakat hendaknya diperhatikan bahwa masyarakat memiliki tradisi, dan adat-istiadat, yang kemungkinan sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial.

Hubungan antara manusia (masyarakat) dengan lingkungan fisik dan non fisik, tidak hanya merupakan hubungan ketergantungan semata, melainkan juga terwujud dalam bentuk hubungan yang saling mempengaruhi dan mampu merubah lingkungan tersebut. Sementara makhluk manusia dengan kebudayaannya juga mampu menciptakan suatu bentuk lingkungan tertentu. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dan mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi dengan mengeliminir kesenjangan yang ada

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini dikarenakan penelitian yang penulis lakukan ini adalah mendeskripsikan data yang ada di objek penelitian, penulis berusaha untuk. memberikan suatu gambaran secara jelas, sistematis, aktual dan akurat tentang keadaan yang ada pada suatu lokasi dan juga mengenal objek yang di teliti di mana di kemukakan tentang keadaan

yang nyata serta berhubungan dengan keadaan tersebut dan berdasarkan fakta tersebut dapat diambil suatu kesimpulan yang terpercaya.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pikir yang bersifat *empirical inductive*, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan (Moleong, 2002).

Sesuai dengan perumusan masalah maka fokus penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

- Pembangunan Desa Pedalaman :
 - a. Pengembangan ekonomi kerakyatan
 - b. Pengembangan Sumber daya manusia handal
 - c. Pengembangan inprastruktur pedesaan
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- Potensi Sumber Daya Alam
- Potensi Sumber Daya Manusia
- Hambatan dan Potensi dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Analisis Data

Proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya sedangkan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan dengan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data model alir yang dikembangkan Milles dan Huberman (2002) sebagai berikut : Reduksi Data, Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan / Verifikasi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas dapat deskripsikan menurut sub fokus penelitian yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data bahwa pembangunan masyarakat Desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur, dapat dilihat dari beberapa indikasi, dan hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Pembangunan Desa Pedalaman

Pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Pada umumnya setiap daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi yang dimaksud sebagian besar berada di daerah pedesaan. Potensi tersebut antara lain: 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) pengembangan tanaman perkebunan; 3) pengembangan usaha perikanan; 4) pengembangan usaha peternakan; 5) pengembangan usaha pertambangan; 6) pengembangan sektor industri; dan 7) potensi keparawisataan.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan, pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, yang pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah pedesaan. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat sampai ke pedesaan.

Dari apa yang digambarkan di atas, maka untuk memajukan ekonomi di daerah pedesaan sebagai percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, maka perlu dikembangkan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Disamping itu yang perlu dikembangkan adalah sumber daya manusia yang handal agar dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menghasilkan nilai ekonomis.

Beberapa kegiatan agribisnis yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) penyerapan tenaga kerja lokal; 4) penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Pembangunan ekonomi pedesaan terutama di daerah yang terpencil (tertinggal) tidak terlepas dari pembangunan sektor pertanian. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat pedesaan (sekitar 80%) mencari nafkah dari sektor pertanian yakni: perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura. Apabila ingin memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan salah satu prioritasnya adalah pengembangan sektor pertanian yang berbasis agribisnis. Untuk jenis agribisnis skala besar seperti perkebunan boleh dikatakan tidak banyak kendala, karena sektor perkebunan yang dikembangkan selama ini berorientasi ekspor yang dikelola oleh perusahaan besar. Namun yang jadi

masalah adalah pengembangan ekonomi pedesaan dari usahatani skala kecil yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

Potensi Sumber Daya Alam

Perkembangan peradaban serta struktur sosio ekonomi masyarakat suatu wilayah juga memberikan tekanan dan pengaruh besar dalam menentukan jenis dan sumber daya yang diperlukan serta cara bagaimana pengelolaan, pemanfaatan atau penggunaan sumber daya tersebut. Hal ini menyebabkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya timbul saling ketergantungan satu sama lain. Ketiadaan atau kekurangan terhadap suatu sumber daya tertentu bagi suatu wilayah akan dapat dipenuhi dari wilayah lain yang memiliki kelebihan akan sumber daya tersebut, demikian pula sebaliknya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme atau kerjasama yang disepakati oleh wilayah-wilayah tersebut.

Sumber daya alam merupakan salah satu milik ekonomi utama negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Sumber daya alam memberikan/menyediakan pekerjaan pada lebih dari tiga per empat tenaga kerja dan menghasilkan/berkontribusi terhadap sebagian besar pendapatan nasional Indonesia (Katili, 1998). Secara garis besar sumber daya alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian utama, yaitu : (1) Sumber Daya Alam Hayati; (2) Sumber Daya Alam Nonhayati.

Sumber daya alam hayati mencakup semua sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dalam artian, sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dapat dikembangbiakkan, seperti tanaman (tumbuhan), hewan (hewan ternak, hewan laut dan lain-lain), terumbu karang dan sebagainya. Sumber daya alam nonhayati mencakup semua sumber daya alam dengan ciri-ciri utamanya adalah tidak dapat diperbaharui oleh manusia. Artinya, jika sumber daya alam tersebut dieksploitaasi secara tidak bijaksana maka akan mempercepat terjadinya pemusnahan sumber daya alam nonhayati tersebut, seperti tanah, minyak bumi, bahan tambang atau mineral (seperti nikel, tembaga, seng, besi, timah, emas dan lain-lain) dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di desa tersebut.

Potensi Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Wijaya, 2002). Rumusan definisi Desa secara lengkap terdapat dalam UU No.22/1999 adalah sebagai berikut: "Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat" (UU Otonomi Daerah, 1999:47).

Dengan adanya pengaturan desa dalam bab XI tersebut diharapkan Pemerintah Desa bersama masyarakat secara bersama-sama menciptakan kemandirian desa. Kemandirian tersebut dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan yang tertuang dalam pasal 206, yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Disinilah peran sumber daya manusia dalam menciptakan kemandiraian desa, tanpa SDM yang handal mustahil pembangunan bisa dicapai.

SDM yang unggul harus dapat dipertahankan secara berkelanjutan, untuk itu diperlukan suatu kebijakan dalam pemberdayaan budaya sebagai aktualisasi kemampuan mengembangkan setiap individu secara mandiri artinya dengan budaya perusahaan yang melahirkan kebersamaan pola pikir mendorong kebiasaan SDM yang unggul memiliki komitmen dalam menjalankan peran yang ditugaskan kepadanya.

Kata kunci dalam usaha memanfaatkan potensi SDM yang unggul terletak pada kemampuan untuk mengorganisir kekuatan dalam “kerja tim” dan pelaksanaan dari pelatihan yang berkelanjutan di pedesaan. Membangun kerja tim di pedesaan, bukan sekedar untuk mengelompokkan orang – orang berada dalam satu tim, melainkan adanya kesiapan diri dari setiap anggota tim atas potensi yang dapat diberikannya untuk menjalankan peran dalam tim sebagai peran *driver* (mengembangkan gagasan, memberi arah, menemukan hal-hal baru); *planner* (menghitung kebutuhan tim, merencanakan strategi kerja, menyusun jadwal); *enable* (ahli memecahkan masalah, mengelola sarana atau sumber daya, menyebarkan gagasan, melakukan negosiasi); *exec* (mau bekerja menghasilkan output, mengkoordinir dan memelihara tim) *controller* (membuat catatan, mengaudit dan mengevaluasi kemajuan tim)

Hambatan dan Potensi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam membangun desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur adalah : Rusaknya jalan atau terbatasnya akses jalan menuju Desa Long Nyelong dengan daerah lain, terutama jalan yang menuju ke Ibu Kota Kabupaten. Keadaan sarana infrastruktur jalan yang masih berupa tanah yang menyebabkan transportasi kurang lancar dan bermasalah. Sulitnya pengairan pertanian terutama untuk areal persawahan, yang selama ini hanya mengandalkan air hujan dan air sumur pantek. Kurangnya penguasaan teknologi pertanian sehingga menyebabkan kurang maksimalnya hasil pertanian. Rendahnya kualitas pendidikan Mayoritas warga masyarakat Desa Long Nyelong, sehingga kurang mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan maupun membuka dan menciptakan lapangan kerja baru. Masih minimnya fasilitas umum, terutama fasilitas kesehatan (sarana dan tenaga medis) dan fasilitas pendidikan. Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat desa maupun di tingkat Kecamatan. Serta masih minimnya

penghasilan ekonomi aparat pemerintah desa menyebabkan adanya tata kinerja yang tidak optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut, Pembangunan Desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur, belum optimal namun upaya-upaya yang dilakukan sudah maksimal oleh pemerintah desa dan masyarakatnya, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan sumber daya manusia yang handal, pengembangan inprastruktur pedesaan serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Potensi sumber daya alam seperti hasil hutan (kayu), sarang burung walet, batubara, emas yang dimiliki Desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur merupakan modal dasar untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam tersebut dilakukan secara lestari untuk keberdayaan masyarakat dengan merancang mekanisme pengelolaan sumber daya alam secara partisipatif dan memperhatikan hak-hak adat dan masyarakat. Peran serta sumber daya manusia di dalam melaksanakan pembangunan di Desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur cukup tinggi, sehingga dapat mendorong keberhasilan suatu pembangunan di Desa tersebut. Potensi sumberdaya alam yang adadi Desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya berbagai hambatan dan tantangan yang ada seperti inprastruktur jalan, kurangnya penguasaan teknologi dan rendahnya pendidikan mayoritas penduduk di Desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur.

Saran

Berdasarkan beberapa uraian pada kesimpulan di atas, maka penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran, sebagai berikut: Dalam proses pembangunan desa, manusia merupakan sumber daya yang berperan sebagai unsur pendukung utama disamping sumber daya alam dan teknologi, oleh karena itu hendaknya kualitas sumber daya manusia perlu di tingkatkatkan sehingga dapat mengelola potensi-potensi yang disediakan oleh alam tanpa bantuan pihak asing dan dapat memperlancar pembangunan. Perlu peran pemerintah daerah agar terus berupaya, memperbaiki dan membangun berbagai sarana infastruktur daerah, baik berupa jalan, jembatan, sekolah dan lainnya, hal ini demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya. Disamping itu juga perlu perbaikan sarana kesehatan. Hendaknya pemerintah dalam pengambilan suatu keputusan untuk pembangunan daerah harusmelihat atau mengerti apa yang paling utama atau parioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, agar pembangunan tersebut tepat pada sasaran. Peran serta masyarakat dan stakeholder untuk dapat mensukseskan melaksanakan program pembangunan di Desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur.

Daftar Pustaka

Anonim, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah". Jakarta.

Anonim, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintah Daerah. Jakarta.

Anonim, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

Atep Adya Brata dan Bambang Trihartanto, 2004, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan negara/Daerah*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Brata Kusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<http://bpdccidenok.blogspot.com/2013/07/faq-seputar-alokasi-dana-desa-add.html>), diunduh tanggal 7 2013.

Pamadji, S. 2001, *Tata Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia. Indonesia Jakarta.